

PERAN MEDIA MASSA SAAT PEMILIHAN UMUM MENGAWASI ATAU DIAWASI

Musfialdy¹⁾

¹⁾*Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Suska Riau,
Jl. HR Soebrantas Km 15 Simpangbaru, Tampan, Pekanbaru 28293
Email: musfialdy@uin-suska.ac.id*

Abstrak

Pemilihan Umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang merupakan kehendak mutlak bangsa Indonesia setelah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi. Nilai demokrasi pada pemilu antara lain setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai mengandung kepastian hukum. Agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, maka penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu. Implementasi dari upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas adalah membentuk dan melaksanakan fungsi pengawasan pemilu. Penataan agenda (Agenda Setting) mengacu kepada kemampuan media massa untuk mengarahkan perhatian khalayak terhadap isu-isu tertentu yang diagendakan media massa. Media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi agenda media kepada agenda publik. Kecenderungan jurnalisme menjadi alat propaganda terutama di musim kompetisi pemilihan umum hal ini karena terkonsentrasinya pemilihan media pada sekelompok elit kekuatan ekonomi, sejumlah konglomerat yang secara keamanan bisnis (business safety) masih sangat tergantung pada kekuatan politik yang sedang atau akan berkuasa. Dalam Pemilu, media jurnalisme mesti menyajikan fakta-fakta dan informasi independen tentang peristiwa dan isu-isu yang akan jadi referensi bagi masyarakat dalam membuat keputusan. Tujuan paling penting bagi media massa adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga. Untuk itu independensi media sangatlah penting. Independen dari otoritas politik, otoritas sosial atau bisnis, dan tidak ada bias personal.

Kata kunci: *Media Massa; Pemilihan Umum;*

1. Pendahuluan

Seiring pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, media baik media massa maupun media sosial mengalami kemajuan yang pesat. Saat ini media merupakan salah satu aspek penting bagi kehidupan manusia. Hampir disetiap sendi kehidupan baik individu maupun secara berkelompok, masyarakat sangat membutuhkan media informasi. Perkembangan media tersebut lebih banyak dipicu oleh banyaknya kebutuhan akan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya. Dalam

perkembangan budaya dan teknologi tidak terlepas dari media yang ada. Bahkan media baik media massa maupun media sosial sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan budaya manusia saat ini. Setiap orang sangat membutuhkan media. Informasi yang ada di media menjadi kebutuhan pokok bagi individu, masyarakat, organisasi bahkan budaya suatu daerah.

Begitu kuatnya peran jurnalisme dalam media tak terlepas dari kebutuhan manusia akan informasi. Peran jurnalisme dalam membuat

informasi di media massa sangat menyentuh pada segala aspek kehidupan di masyarakat. Peran ini pun terasa pada dimensi politik khususnya pada proses pemilihan umum. Kajian peran jurnalisme dalam menginformasikan berita di suatu media bagaikan dua buah mata pisau. Disatu sisi media merupakan media sosial dimana berperan sebagai alat edukatif, interaksi sosial dan komunikasi. Namun disisi lain juga merupakan lembaga ekonomi yang tak terlepas dari untung ruginya usaha yang dilakukan.

Syarif Kasim Riau. Jurnal Risalah menerima manuskrip atau artikel dari berbagai kalangan akademisi dan peneliti baik nasional maupun internasional.

Kerangka berfikir

1. Pemilihan umum

Pemilihan Umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang merupakan kehendak mutlak bangsa Indonesia setelah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi. Nilai demokrasi pada pemilu antara lain setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai mengandung kepastian hukum (predictable procedur), setiap tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan azas pemilu yang demokratis yakni Langsung umum bebas dan rahasia (luber), Jujur dan Adil (jurdil) serta Akuntabel (Free and fairelection), proses penyelenggaraan pemilu mengandung sistem pengawasan untuk menjamin setiap pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dan juga hasil pemilu yang akurat dan sesuai dengan hasil pilihan pemilih (Electoral Integrity), proses penyelenggaraan pemilu mengandung sistem penyelesaian sengketa pemilu dengan prosedur dan keputusan yang adil dan cepat

Pemilihan umum dilaksanakan berguna antara lain;

- Mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan presiden/wakil presiden serta kepala daerah/wakil kepala daerah untuk membuat dan

melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat

- Mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/atau mengenai sirkulasi elit secara priodik dan tertib.
- Mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan masyarakat kedalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradap.

Menurut Tim Peneliti LIPI, Kriteria tentang pemilu yang jujur dan adil juga diukur dari lima parameter dalam konteks penentuan kadar demokratis suatu pemilu yakni :

- Universalitas (Universality) ; pemilu demokratis harus diukur secara universal karena nilai-nilai demokrasi adalah universal artinya konsep, sistem, prosedur, perangkat dan pelaksana pemilu harus mengikuti kaidah demokrasi yang universal itu sendiri.
- Kesetaraan (Equality) ; pemilu demokrasi harus mampu menjamin kesetaraan masing-masing kontestan untuk berkompetisi secara free and fair, oleh karena itu regulasi pemilu seharusnya dapat meminimalisir terjadinya ketidaksetaraan politik (political inequality),
- Kebebasan (freedom) ; pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kebebasan pemilih menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, iming-iming pemberian sesuatu yang akan mempengaruhi pilihan pemilih.
- Kerahasiaan (secrecy) ; pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kerahasiaan pilihan politik pemilih, bahkan oleh panitia pemilihan sekalipun. Kerahasiaan sebagai sebuah prinsip sangat terkait dengan kebebasan seseorang dalam memilih.

- Transparansi (transparency) ; pemilu yang demokratis harus menjamin transparansi dalam segala hal yang terkait dengan aktivitas pemilu yang dilakukan oleh semua pihak dalam proses pemilu yakni penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu dan pengawasan serta pemantau pemilu. (Lili Romli,"Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sri Yanuarti, "Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu ; Studi kasus Jawa Tengah". Buku laporan Penelitian LIPI dengan Balitbang Departemen Dalam Negeri, hal 103-104 (Jakarta P2P LIPI 2004).

2. Pengawasan

Agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, maka penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu. Implementasi dari upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas adalah membentuk dan melaksanakan fungsi pengawasan pemilu

- Pengertian pengawasan menurut George R. Terry yang dikutip Muchsan SH menyatakan sebagai berikut; "*Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to result in keeping with the plan*"
- Dalam pengertiannya pengawasan menitik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan demikian tindakan pengawasan itu tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.
- Menurut Hendry fanyol menyebutkan : "*Control consist in veryfying wether*

everything accur in conformity with the plan asopted, the instruction issued and principles established. It has for object to point out weaknesses and errors in to recttivy then and prevent recurrence"

- Adapun maksud dari pengertian diatas adalah realitas bahwa hakikat merupakan suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Melalui pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan- kesalahan yang akhirnya kesalahan-kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali.
- Sementara itu Newman berpendapat bahwa "*control is assurance that the perfomance conform to plan*". Ini berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Karena itu, pengawasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan.
- DR. S.P. Siagian, MPA menggambarkan pengawasan sebagai berikut; "Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan."
- Pendapat Siagian ini sama dengan Newman dimana pengawasan menitik beratkan pada tindakan pengawasan pada proses yang sedang berjalan atau dilaksanakan. Pengawasan tidak dilaksanakan pada akhir suatu kegiatan, justru pengawasan dilaksanakan pada dalam menilai dan mewarnai hasil yang akan dicapai oleh kegiatan yang sedang dilaksanakan tersebut.
- Berdasarkan definisi diatas, wujud pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara

de facto. Sedangkan tujuan pengawasan hanyalah terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya karena pengawasan tidak terkandung kegiatan yang bersifat korektif ataupun pengarah.

- Adapun fungsi pengawasan secara teoritis berfungsi sebagai ;
- Pertama Eksplanasi, pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang dicanangkan berbeda.
- Kedua Akuntansi, pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu.
- Ketiga Pemeriksaan, pengawasan membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka. dan
- Keempat Kepatuhan, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi pemerintah dan atau lembaga profesional

3. Fungsi media

Ada beberapa alasan yang menjadikan media menjadi sangat penting dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan fungsi media antara lain :

- Individu, penganugerahan status (pencitraan) seseorang sering menjadikan media massa maupun media sosial sedia alat untuk menganugerahan status (pencitraan) guna kepentingan

politik, ekonomi, sosial dan agama mereka, menambah prestise, peringatan, dan instrumental

- Masyarakat media berfungsi sebagai, peringatan, Instrumental, Etisiasi.
- Kelompok/organisasi, media berfungsi sebagai Instrumental :
- Kegunaan media informasi bagi kekuasaan, Deteksi : Pengetahuan tentang perilaku yang menyimpang dan subversif, mengatur opini publik, memonitor, mengontrol, mengesahkan kekuatan, penganugerahan status.
- Budaya, media berfungsi sebagai, meningkatkan kontak antar budaya, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan budaya tersebut.

Selain fungsi diatas, ada beberapa asumsi dasar terhadap suatu media:

- Medium is the message, pemahaman bahwa media merupakan pembentuk kebudayaan. Untuk pengaruh media dalam kebudayaan yakni pembentukan nilai dan pola pemikiran manusia
- Teknologi adalah kekuatan dominan, pada dasarnya sistem sosial dan sistem ekonomi mempromosikan teknologi dan mendominasi kebudayaan
- Media massa mendorong kebudayaan dalam ekonomi dalam segmentasi informasi. Segmentasi ini merupakan penajaman segmen konsumen yang mengkonsumsi media atau industri media yang ada

Pendapat lain menjelaskan Media massa selain berfungsi menginformasikan juga berfungsi sebagai alat untuk mempromosikan, pendidikan, hiburan, propaganda, sosial atau kemanusiaan dan fungsi pengawasan atau fungsi kontrol.

Dalam sejarah perkembangannya, pada awal media massa lebih banyak berfungsi

sebagai media kontrol terhadap pemerintah. Pengawasan yang dilakukan oleh bukan dalam rangka menghakimi atau mengintimidasi. Tetapi upaya yang pengawasan atas kebijakan yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah. Media juga sebagai alat dari masyarakat dalam menginformasikan pengawasan yang dilakukan mereka.

4. Teori Agenda Setting

Penataan agenda (Agenda Setting) mengacu kepada kemampuan media massa untuk mengarahkan perhatian khalayak terhadap isu-isu tertentu yang diagendakan media massa. Media massa dapat mempengaruhi khalayak tentang apa yang ada dalam pikiran mereka, artinya media massa mempengaruhi persepsi khalayak mengenai apa yang dianggap penting. Media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi agenda media kepada agenda publik.

Dengan demikian tersirat bahwa media massa itu perkasa dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi khalayak. Dalam penerapannya, media massa membuat agenda tertentu mengenai apa yang harus dipikirkan oleh khalayak dengan memilih dan mengemas informasi yang dikehendaki. Setelah itu khalayak membentuk persepsinya berdasarkan informasi yang diterimanya dari media massa.

Menurut media ini terkadang kita cenderung menilai sesuatu itu penting sebagaimana media menganggap hal tersebut penting. Artinya jika media massa menganggap hal penting maka kita akan menganggap hal tersebut juga penting. Sebaliknya jika isu tersebut tidak dianggap penting maka kita pun tidak menganggap penting isu tersebut.

Dalam studi pendahuluan tentang Agenda Setting, McCombs dan Shaw (1972) menunjukkan hubungan di antara beberapa surat kabar tertentu dan pembacanya dalam isu-isu yang dianggap penting oleh media dan publik. Jenjang pentingnya isu publik ini disebut sebagai *salience*. Akan tetapi, studi ini sendiri bukanlah Agenda Setting seperti yang kita maksudkan, karena arah penyebabnya

tidaklah jelas. Baik media ataupun publik bisa saja menimbulkan kesepakatan tentang jenjang isu-isu publik.

Selain itu, studi pendahuluan ini masih berupa suatu perbandingan umum, bukan perbandingan individual, seperti yang ditetapkan dalam hipotesis Agenda Setting ini. McCombs dan Shaw (1972) mengakui keterbatasan ini dalam studinya dan mengungkapkan bahwa “penelitian-penelitian lain harus meninggalkan konteks sosial yang umum dan memakai konteks psikologi sosial yang lebih spesifik”. Sayangnya saran ini tidak sepenuhnya diikuti dalam hampir seluruh penelitian agenda setting yang dilakukan kemudian (Becker, 1982).

Di pihak lain, studi-studi berikutnya tentang Agenda Setting berhasil menetapkan urutan waktu dan arah penyebab. Dalam kondisi tertentu, peneliti menunjukkan bahwa media massa benar-benar dapat menentukan agenda bagi khalayak yang spesifik, paling tidak pada suatu tingkat agregatif (cf. Shaw dan McCombs, 1977).

Pembahasan

Pada perkembangan saat ini, media massa dituntut untuk lebih mengedepankan informasi sebagai alat yang independen atau netral pada saat pemilu berlangsung. Media selama ini dianggap sebagai kontrol sosial atau penengah dalam kehidupan sosial politik yang ada. Peran media sebagai lembaga kemapat disamping legislatif, eksekutif dan yudikatif, diharapkan menjadi corong masyarakat terhadap dinamika sosial politik di suatu daerah.

Bahkan dalam salah satu element dalam sembilan element jurnalistik Bill Kovach menjelaskan jurnalistik orang dibalik informasi media diharapkan mampu menjadi pengawas kekuasaan yang ada saat ini., Pakar jurnalisisme dan Ketua Committee of Concerned Journalists Bill Kovach saat peluncuran buku *Sembilan Elemen Jurnalisisme*, Desember 2003 mengemukakan jurnalisisme dan demokrasi tumbuh bersama-sama. Demokrasi tidak akan eksis tanpa jurnalisisme politik yang baik.

furnalisme gosip, rumor, jurnalisme yang bercampur dengan hiburan, atau jurnalisme yang menjadi propaganda politik akan meracuni demokrasi (Kovack, 2001).

Dalam Pemilu, jurnalisme mesti menyajikan fakta-fakta dan informasi independen tentang peristiwa dan isu-isu yang akan jadi referensi bagi masyarakat dalam membuat keputusan. Kovach mengingatkan bahwa tujuan paling penting bagi jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup merdeka dan mengatur diri sendiri. Untuk itu independensi media sangatlah penting. Independen dari otoritas politik, otoritas sosial atau bisnis, dan tidak ada bias personal. Loyalitas jurnalis semestinya bukan loyalitas pada pemilik media tetapi loyalitas kepada warga negara.

Kovack merekomendasikan model watchdog journalism atau anjing penjaga yang secara sederhana menempatkan media dan jurnalis sebagai the monitor of power bukan agent of power. Dalam konteks penerapan jurnalisme politik pada institusi media komersial, kredibilitas media dipengaruhi kemampuannya mengimbangi pesan-pesan periklanan politik yang diterimanya dengan muatan jurnalisme politik yang kritis terhadap kesalahan yang dilakukan pemasang iklan itu. Hal itu dapat dilakukan, antara lain dengan poling rutin media untuk menyiarkan visi, misi, dan program partai/capres dan cawapres dengan waktu/ruang yang memadai sehingga dapat membantu pemilih menseleksi informasi politik yang dibutuhkan. Media massa baik cetak maupun elektronik idealnya tidak hanya "panen" iklan politik, tetapi marak dengan berita-berita politik yang tajam. Peran watchdog dalam media secara sederhana adalah peran kritis membuat manajemen dan proses eksekusi kebijakan dari kekuasaan berlangsung transparan, membuat publik mengetahui persis

Saat ini media masaa menjadi propaganda. Menurut Noam Chomsky, kecenderungan media menjadi propaganda terutama di musim kompetisi pemilihan presiden merupakan akibat dari beragam aspek.

Pertama, terkonsentrasinya pemilikan media pada sekelompok elit kekuatan ekonomi, sejumlah konglomerat yang secara keamanan bisnis (business savety) masih sangat tergantung pada kekuatan politik yang sedang atau akan berkuasa (Chomsky, 1991). Penguasaan atas media utama seperti televisi komersial oleh pengusaha bertipe demikian akan menempatkan media itu sebagai alat tawar politik mereka dengan calon penguasa yang dinilai optimis memenangkan pertarungan politik. Imbalannya, media itu akan dijadikan ruang promosi dan pembentukan opini publik memenangkan kandidat yang bersedia memberi kompensasi keamanan mengelola korporasi media mereka di masa mendatang. Baik di Indonesia maupun di sejumlah negara lain, pemilikan media (media ownership) terkonsentrasi pada sekelompok pengusaha yang tidak independen terhadap pengaruh politik bahkan kelahirannya secara historis diberi gizi oleh rezim otoriter yang berkuasa, bukan oleh kehendak publik.

Kedua, orientasi komersial yang terlampau berlebihan, penggunaan iklan sebagai sumber utama pendapatan (primary source of income) bisnis media. Musim pemilihan umum sebagaimana musim kompetisi sepak bola atau olah raga lainnya ibarat musim panen bagi media massa untuk meraup keuntungan dari iklan politik yang dipasok oleh partai politik atau kandidat presiden-wakil presiden. Perputaran uang yang mencapai ratusan milyar rupiah jelas menggiurkan, apalagi bagi pengusaha pemula yang masih haru berjuang keras meraih posisi am:rn dalam bisnisnya. Situasi ini didukung oleh regulasi iklan politik yang longgar, yang membuka konspirasi pemilik media dengan para politisi dalam terorisasi publik melalui iklan-iklan yang pesan politiknya dangkal.

Ketiga, tradisi jurnalistik yang masih konvensional, menggantungkan sumber informasinya (sourcing mass media news) pada tiga lingkaran elit dalam masyarakat, yaitu kalangan bisnis, pemerintah dan pakar, akademis atau peneliti. Berita-berita yang digali

berbasis sumber informasi dari kalangan lapisan bawah (grassroot people) jarang mendapat tempat yang layak sebagai pembuka perdebatan apalagi menjadi berita utama (headline).

Keempat, mengedepankan norma "kalah menang" dalam politik, sebagai bagian dari disiplin peliputan media atas pelaksanaan Pemilu. Media terjebak untuk mengadu dua atau lebih kandidat presiden dengan menghitung kecepatan mereka berlari mengejar kuantitas dukungan, tanpa peduli apakah dukungan itu diraih dengan cara mobilisasi semu atau pendidikan politik yang memadai. Situasi ini mirip ajang pacuan kuda (horserace) ketika media lebih fokus pada laporan siapa yang menang (who's leading) dan siapa yang kalah (who's losing out). Perang wacana yang bersifat menyerang satu sama lain antarkandidat ditempatkan sebagai menu utama, ketimbang pertarungan gagasan genial untuk mengatasi masalah mendasar bangsa. Menjelang hari pemungutan suara, media lebih banyak menampilkan survei peringkat kandidat prediksi siapa memang dan kalah, pidato atau pernyataan informal kandidat (candidate's speeches). Media mulai mengurangi sajiannya seputar kualifikasi kandidat latarbelakang politik dan pandangan pemilih atas mereka.

Kesimpulan

Ketika jurnalisme telah diintervensi kepentingan komersial pemilik media, maka kita tidak akan pernah menemukan suatu proses pemberitaan yang benar-benar bersifat netral. Ideologi di balik jurnalisme profesional tidak lain sebagai bentuk penghambaan terhadap pemilik modal dan pemasang iklan dalam suatu sistem media. Isi bukan ditujukan bagi kepentingan pembaca atau pemirsa, tetapi justru lebih diupayakan bagi kepuasan kedua pemodal dan pemasang iklan yang notabene elit politik. "Obyektifitas" peliputan Pemilu adalah penerima secara terang-terangan terhadap keinginan politisi dan partai politik dalam upaya mengejar target politiknya. Jurnalisme profesional telah menjadi suatu aktifitas kering yang kehilangan semangat independensi.

Dalam praktek jurnalisme politik di negara berkembang seperti Indonesia, jarang ditemukan berita dan opini yang mendalam atau bersifat analitis, melibatkan semua sudut pandang dalam masyarakat. Kebanyakan realitas media lebih tampak sebagai sebuah sajian spekulasi-spekulasi, korelasi-korelasi instrumental, bukan korelasi substansial. Karena akses penguasaan informasi dan pengendalian jurnalis yang hanya lebih terpusat pada lingkaran elit sumber di masyarakat, media utama (mainstream) kerap kali lebih berperan sebagai alat propaganda kelompok-kelompok kepentingan dominan dalam masyarakat seperti partai politik atau politisi yang berkuasa.

Pemilu adalah ujian independensi dan kredibilitas media maupun jurnalis dalam menerapkan jurnalisme politiknya. Fakta menunjukkan media dan jurnalis belum mampu menjadi kekuatan kontrol atas proses politik nasional yang berlangsung bahkan terjebak menjadi corong kepentingan kekuatan elit politik dan mengabaikan fungsi media pendidikan pemilih. Jurnalisme politik dalam pemilu identik sebagai jurnalisme propaganda dan atau jurnalisme borjuis. Jurnalisme yang menghamba kepada kepentingan politisi dan pemodal kapitalis yang memanfaatkan pemilu untuk aktifitas tawar-menawar politik demi menjaga keberlangsungan bisnis atau karir politiknya.

Daftar Pustaka

- Alfian. 1991. *Komunikasi Politik dan Sistem Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Nimmo, Dan. 1978. *Political Communication and Public Opinion in America*. California: Goodyear Publishing Company Santa Monica
- Budiardjo, Marriam, 2008 *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Jakarta
- Bill Kovack & Tom Rosenstiel, 2006 *Sembilan Elemen Jurnalisme*, Apa yang seharusnya diketahui Wartawan dan diharapkan publik Epilog Edisi Indonesia, PANTAU

- Kantaprawira, Rusadi. 1983. *Sistem Politik di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru
- Lili Romli, Mardyanto Wahyu T, 2004, Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Laporan Penelitian Kerjasama LIPI dan Departemen Dalam Negeri, Jakarta LIPI
- McCombs M.E and Shaw, D. L (1972), The Agenda Setting Function of Press, Public Opinion Quaterly
- Noam Chomsky (1994) , Critical Assessment, Routledge 11 New Fetter Lane. London
- Susanto, Astrid S. 1975. *Pendapat Umum*. Jakarta: Bina Cipta
- Subakti, Ramlan Dkk 2008. Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum, Kemitraan Patnership
- Surbakti, Ramlan, 2002 Sistem Pemilihan Umum dan Proses Pelaksanaan Pemilihan Umum, KIPP, Jakarta
- Surbakti, Ramlan,; “Sistem Pemilihan Umum dan Proses Pelaksanaan Pemilihan Umum” dalam *Menata Politik Paska Reformasi*. Cet. 1., (Jakarta; KIPP Indonesia, 2000), hal.41.